Term of Reference

Focus Group Discussion Pertama: Penyusunan Kajian Kritis Penguatan Instrumen ISPO

Latar Belakang

Tanaman kelapa sawit saat ini hampir tersebar di seluruh daratan Indonesia. Pada tahun 2014, Sumatera adalah pulau yang mempunyai perkebunan kelapa sawit terluas dengan luas realisasi tanam sebesar 6,9 juta hektare, disusul Kalimantan seluas 3,5 juta hektare serta pulau lainnya seperti Sulawesi, Maluku, Papua, dan Jawa.[1]

Seiring dengan penambahan luas realisasi tanam kelapa sawit serta berkembangnya industri kelapa sawit di berbagai wilayah Indonesia, produksi kelapa sawit nasional dalam wujud minyak sawit (CPO) juga terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2000, produksi CPO Indonesia mencapai 7 juta ton. Produksi ini meningkat lebih dari 4 kali lipat di tahun 2014, yaitu sebesar 29,3 juta ton. Dan diproyeksikan terus meningkat hingga 78 juta ton pada tahun 2020.[2]

Gambar 1. Sebaran Areal Tanaman Kelapa Sawit di Indonesia

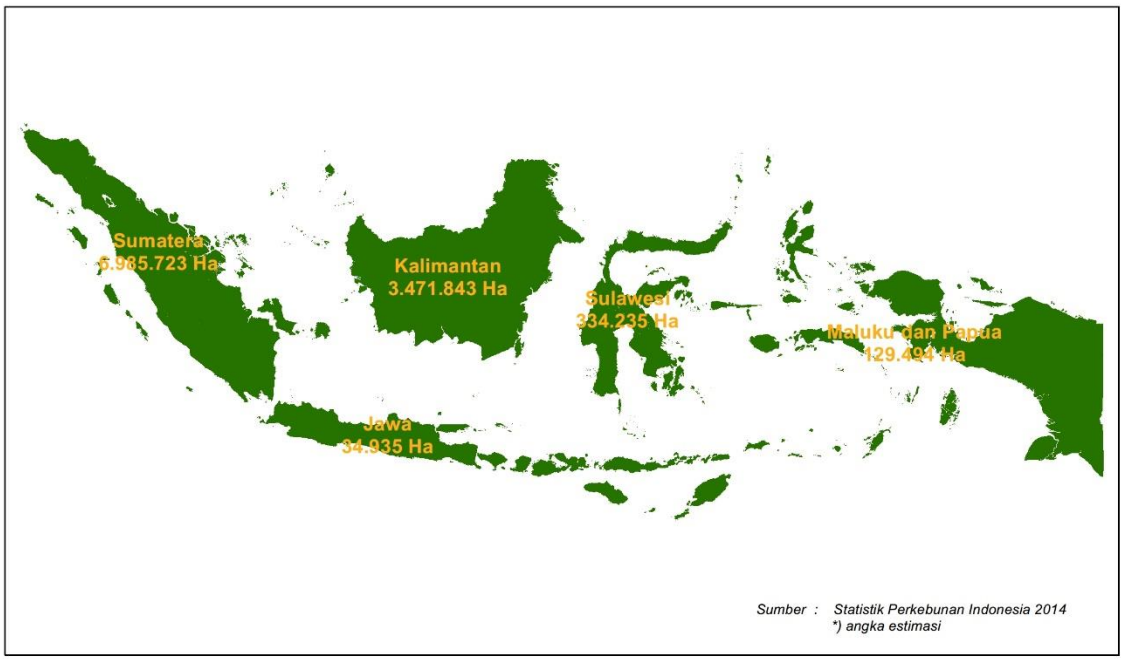

Sumber: Statistik Perkebunan Indonesia, 2014

Peningkatan produksi minyak kelapa sawit yang sangat cepat dikhawatirkan dapat mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan (*sustainability*) yang berakibat pada hilangnya

[1] Satistik Perkebunan Indonesia, 2014
[2] *Oil World,* 2014

Contact Person:
Rizka: No. HP: 085742252165, E-mail: rizkayunikartika@fwi.or.id
Pemantau Hutan @fwindonesia
#stopdeforestasi

tutupan hutan dan kawasan hutan, meningkatnya emisi gas rumah kaca, dan memicu konflik sosial dengan masyarakat adat/lokal di areal sekitar perkebunan.

Pemerintah didorong untuk menerapkan sebuah instrument penilaian berdasar pada sistem keberlanjutan (*sustainability*) dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berwawasan lingkungan yaitu ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). Penerapan kebijakan ini beranjak dari program moratorium izin baru di kawasan hutan primer dan lahan gambut yang bertujuan untuk menyelamatkan hutan dan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 41 persen pada tahun 2020 dengan dukungan internasional.

Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang selanjutnya disebut ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.[3]

Penerapan ISPO sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan bagi seluruh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia berlaku sejak tahun 2012. Seharusnya perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam waktu paling lambat sampai dengan 31 Desember 2014 harus bersertifikasi ISPO.[4] Namun kenyataannya, sampai dengan Januari 2014 hanya 40 perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi ISPO dari 2302 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah memiliki IUP di seluruh Indonesia.[5]

Di sisi lain, perkembangan perkebunan kelapa sawit ternyata juga membawa dampak buruk bagi hutan dan kawasan hutan di Indonesia. Pada kurun waktu 2009-2013, sekitar 516 ribu hektar lahan terdeforestasi di dalam konsesi perkebunan kelapa sawit.[6] Selain itu, konflik sosial dengan masyarakat adat/ lokal di sekitar perkebunan kelapa sawit tidak dapat terhindarkan. Terhitung pada tahun 2015 saja ada sekitar 127 konflik agraria di sektor perkebunan, atau 50% dari total konflik agraria secara keseluruhan.[7]

Dengan segala dampak yang ditimbulkan dari pembangunan perkebunan kelapa sawit, sudah seharusnya pembangunan yang dilakukan selalu berada dalam koridor benar. Dan dalam rangka pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan, ISPO juga harus bisa menjadi instrument yang *transparan* dan *accountable* serta mampu untuk mencegah dan atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul akibat adanya pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Dalam rangka penguatan sistem sertifikasi ISPO sebagai sebuah sistem yang mandatori, Forest Watch Indonesia (FWI) melakukan kajian kritis terhadap sistem ini serta keterkaitannya dengan permasalahan deforestasi dan konflik lahan. Hasil kajian ini

---

[3] Permentan No 19/2011 Tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
[4] Pasal 3, Permentan No 19/2011 Tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
[5] Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, 2015
[6] Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009 2013
[7] Konsorsium Pembaharuan Agraria, Catatan Akhir Thaun 2015: Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik Agraria Disandera Birokrasi, 2015, KPA: Jakarta, hlm.4

Contact Person:
Rizka: No. HP: 085742252165, E-mail: rizkayunikartika@fwi.or.id
Pemantau Hutan **@fwindonesia**
#stopdeforestasi

diharapkan memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan para pihak yang berkepentingan tentang aspek-aspek penting yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam sistem sertifikasi ISPO.

Tujuan:

Diskusi ini adalah rangkaian kegiatan dari kajian yang dilakukan dan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dan masukan terkait dengan sistem sertifikasi ISPO.

Keluaran:

Adanya catatan kritis sebagai bahan rekomendasi untuk penguatan sistem sertfikasi ISPO dalam upaya mencegah deforestasi dan konflik lahan.

Waktu dan Tempat:

Diskusi ini akan dilaksanakan pada kamis, 31 Maret 2016 di Hotel Savero Golden Flower, Jl. Pajajaran No.27, Bogor**.**

Agenda (Tentative):

Waktu	Acara	PJ	**Keterangan**
08.30 – 09.00	Registrasi Peserta	Panitia	
09.00 – 10.00	Coffee break	Panitia	
10.00 – 10.10	Pembukaan	Direktur FWI	Dipandu oleh Moderator
10.10 – 10.55	Pemaparan dan Diskusi terkait sistem sertifikasi ISPO	1. Ketua Komisi ISPO Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian: Prinsip dan Sistem ISPO* 2. Auditor: Aspek Ekologi dan Sosial di dalam ISPO 3. TuK (Transformasi untuk Keadilan Indonesia): Aspek Produksi dan hak masyarakat lokal/adat di dalam ISPO	** dalam konfirmasi*
10.55 – 12.00	Tanya Jawab	Moderator	
12.00 – 13.00	Ishoma	Panitia	
13.00 – 13.30	Pemaparan Kajian Kritis Penguatan Instrumen ISPO	FWI	Dipandu oleh moderator
13.30 – 15.30	Diskusi	Moderator	
15.30 – 16.00	Kesimpulan dan Penutup	Moderator	

Contact Person:
Rizka: No. HP: 085742252165, E-mail: rizkayunikartika@fwi.or.id
Pemantau Hutan **@fwindonesia**
#stopdeforestasi

Peserta Kegiatan:

1. Sawit Watch
2. TuK (Transformasi untuk Keadilan Indonesia)
3. WWF Indonesia
4. Greenpeace Indonesia
5. Walhi
6. Wetlands International Indonesia
7. SPKS
8. CIFOR
9. AMAN
10. HuMa
11. UK Climate Change Unit
12. Auriga
13. ICEL
14. WRI
15. EIA
16. JPIK
17. TAF
18. Pusaka
19. JKPP
20. Wirendro Sumargo

Keterangan:

Peserta kegiatan diharapkan dapat mengkonfirmasi kehadiran paling lambat **Selasa, 29 Maret 2016** melalui Rizka Yuni Kartika: HP 085742252165 : email rizkayunikartika@fwi.or.id

Contact Person:
Rizka: No. HP: 085742252165, E-mail: rizkayunikartika@fwi.or.id
Pemantau Hutan **@fwindonesia**
#stopdeforestasi